

# Efektifitas Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon

Zulikha Niniekasari dan Gerry Firmansyah

Magister Ilmu Komunikasi

zniniekasari@gmail.com

**Abstract** — The development of information technology in everyday life is very rapid so it can increase the productivity of an individual and an organization. The government sector also utilizes information technology to improve the provision of effective and efficient public services Likewise with the Government of Indonesia, in 2022 issued Presidential Regulation No. 132 of 2022 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) as a guideline for governance that utilizes information and communication technology to provide quality public services. SPBE evaluation and monitoring is carried out by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) in every government agency in Indonesia. In 2022 the results of the SPBE evaluation at the Cirebon Regency Government obtained a score of 2.11 with a sufficient index. For this reason, this research focuses on improving the governance of SPBE, which includes standardization and integration of SPBE business processes in the Cirebon Regency Government. The researcher provides a solution in the form of the SPBE enterprise architecture design in the business processes domain according to the SPBE architecture and adapted using the TOGAF ADM method. Some of the phases used are the preliminary phase, the architectural vision, and the business architecture process

**Keyword** — Business Process Architecture, Enterprise Architecture, Cirebon Regency, SPBE

**Abstrak** — Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat pesat sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu individu maupun organisasi. Sektor Sektor Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 132 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan public Evaluasi dan monitoring SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada setiap instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2022 hasil evaluasi SPBE di Pemda Kabupaten Cirebon memperoleh nilai 2.11 dengan indeks cukup yang berkualitas. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan tata kelola SPBE yang termasuk di dalamnya yaitu standarisasi dan integrasi proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Cirebon. Peneliti memberikan solusi berupa rancangan desain enterprise architecture SPBE di domain proses bisnis sesuai dengan arsitektur SPBE dan disesuaikan menggunakan metode TOGAF ADM. Beberapa fase yang digunakan yaitu preliminary phase, architecture vision, dan arsitektur proses bisnis

**Kata kunci** — Arsitektur Proses Bisnis, Enterprise Architecture, Kabupaten Cirebon, SPBE

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari berkembang

sangat pesat sehingga memudahkan dalam mencari, mempelajari dan mendapatkan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi maupun individu. Salah satu organisasi yang memanfaatkan TIK yaitu instansi pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan public yang baik. Pemanfaatan E-government salah satu bentuk peningkatan pelayanan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses birokrasi.

Berdasarkan hasil survei E-government Development Index (EGDI) tahun 2020 oleh United Nations, Indonesia mendapat poin 0.6612 dan berada pada peringkat 88 dari 193 negara di dunia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia berada di atas negara Cambodia [5]. Dapat dilihat peringkat EGDI wilayah Asia Tenggara di tahun 2022.

Tabel I

Peringkat EGDI Asia Tenggara.

No	Negara	Poin Indeks
1	Singapura	0,9133
2	Malaysia	0,774
3	Thailand	0,766
4	Brunei Darussalam	0,727
5	Indonesia	0,716
6	Filipina	0,6523
7	Kamboja	0,5056
8	Myanmar	0,4994
9	Timor Leste	0,4372
10	Laos	0,3764

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 132 tahun 2022 tentang Sistem Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan pada cakupan nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE pada tahun 2019 oleh Kemen PANRB, Pemda Kabupaten Cirebon mendapat nilai indeks SPBE dengan predikat SPBE yaitu cukup. Salah satu nilai terkecil evaluasi SPBE Pemda Kabupaten Cirebon yaitu pada domain tata kelola SPBE. Sesuai dengan Perpres No. 132 tahun 2022 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang terpadu antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu adanya transformasi mendasar pada pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE. Sehubungan dengan hal itu, Pemda Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan kembali

indeks SPBE dengan melakukan optimalisasi teknologi informasi serta standarisasi dan integrasi proses bisnis.

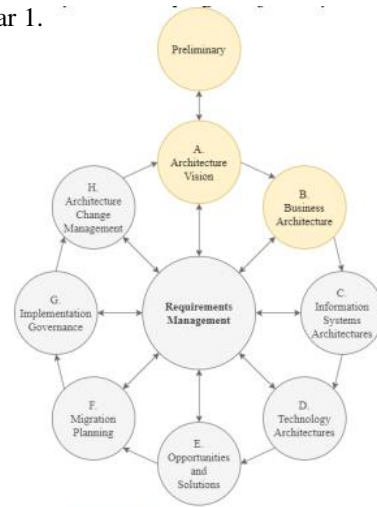
Dengan kondisi Pemda Kabupaten Cirebon di atas, dibutuhkan perancangan sistem informasi dari berbagai aspek seperti, arsitektur bisnis organisasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi agar tercapai layanan SPBE yang terintegrasi. Perancangan yang dibutuhkan yaitu enterprise architecture (EA) dalam penggambaran model arsitektur SPBE. Enterprise architecture merupakan kumpulan metode dan prinsip yang dapat mewujudkan keselarasan bisnis dengan teknologi informasi suatu organisasi. Sedangkan arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi hingga keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Terdapat enam domain arsitektur SPBE yaitu domain proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan

Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggambaran arsitektur EA di domain proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Cirebon dengan menerapkan model arsitektur SPBE dan metode TOGAF ADM (Architecture Development Method). Penyusunan proses bisnis SPBE mengacu ke No. 132 tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. TOGAF ADM merupakan metode pengembangan EA yang umum dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi serta dapat digabungkan dengan kerangka kerja lain untuk menghasilkan arsitektur yang spesifik. TOGAF ADM membentuk siklus proses iteratif yang terdiri dari beberapa fase, diantaranya *Preliminary phase*, *Phase A: Architecture Vision*, *Phase B: Business Architecture*, *Phase C: Information System Architecture*, *Phase D: Technology Architecture*, *Phase E: Opportunities and Solution*, *Phase F: Migration Planning*, *Phase G: Implementation Governance*, *Phase H: Architecture Change Management*, dan *Requirements Management*. Berdasarkan uraian di atas, perancangan EA pada penelitian ini berdasarkan arsitektur SPBE disesuaikan dengan metode TOGAF ADM untuk menggambarkan model arsitektur yang berfokus di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Cirebon. Keluaran perancangan model arsitektur proses bisnis SPBE ini yaitu berupa peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi yang diidentifikasi berdasarkan kondisi RPJMD Pemda Kabupaten Cirebon.

## II. RINGKASAN FORMAT MANUSKRIP

Perancangan *enterprise architecture* pada penelitian ini menggunakan acuan berdasarkan arsitektur SPBE pada Perpres No.132 tahun 2022 yang disesuaikan dengan metode TOGAF ADM. Enterprise Architecture dapat menghasilkan cetak biru untuk mengintegrasikan strategi bisnis organisasi dengan sistem informasi dan teknologi. Penelitian ini menggunakan TOGAF ADM karena memiliki model arsitektur yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan digabungkan dengan kerangka

kerja lain yaitu arsitektur SPBE. TOGAF ADM memiliki 8 fase utama dan sebuah fase pendahuluan yang ditunjukkan pada Gambar 1.

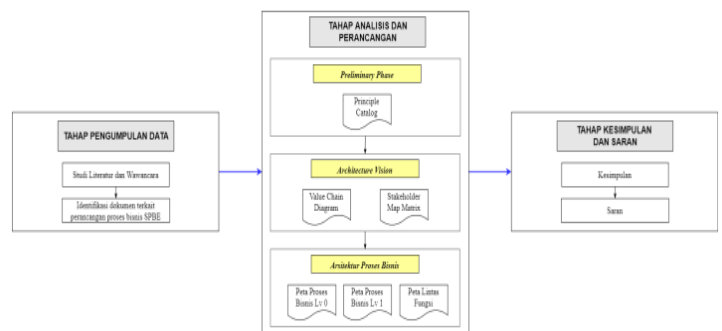


Gambar 1. TOGAF ADM

Fase-fase TOGAF ADM menggambarkan siklus yang dapat diulang untuk mengembangkan EA. Fase TOGAF yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari preliminary phase, architecture vision, dan business architecture yang disesuaikan dengan arsitektur SPBE menjadi arsitektur proses bisnis. Deskripsi dari tiap fase utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Preliminary phase, merupakan fase inisiasi kebutuhan bisnis organisasi serta prinsip-prinsip arsitektur sesuai dengan arahan organisasi.
2. Architecture vision, merupakan fase awal untuk menggambarkan ruang lingkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholders, serta nilai-nilai utama untuk mencapai visi misi organisasi.
3. Arsitektur proses bisnis, merupakan fase utama dalam pemodelan strategi bisnis organisasi, dalam SPBE ini melalui pendefinisian dan penyusunan peta proses bisnis.

Tahapan dalam penelitian perancangan EA SPBE di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Cirebon ini terdiri dari tiga tahapan, meliputi tahap pengumpulan data, tahap analisis dan perancangan, dan tahap kesimpulan dan saran. Secara lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 2. Metode Penelitian



Gambar 2. Metode Penelitian

data. Pada tahap ini bertujuan untuk menjelaskan teknik pengumpulan data penelitian terhadap perancangan EA SPBE. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan studi literatur. Langkah awal pada tahap ini yaitu pengenalan terhadap objek penelitian dan pengenalan terhadap konsep SPBE. Selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber dari Pemda Kabupaten Cirebon untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mengetahui kondisi eksisting Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur dengan mempelajari beberapa dokumen peraturan perundangan yang berkaitan dengan SPBE dan proses bisnis, yaitu Perpres No. 132 tahun 2022 dan serta mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan terhadap EA SPBE.

Tahap kedua pada penelitian ini yaitu tahap analisis dan perancangan. Deskripsi langkah-langkah pada tahap kedua ini yaitu sebagai berikut:

1. Langkah awal pada tahap ini yaitu preliminary phase dengan melakukan identifikasi prinsip-prinsip proses bisnis dari TOGAF yang disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan artefak principle catalog.
2. Selanjutnya pada architecture vision melakukan identifikasi nilai-nilai proses utama dan pendukung Pemda Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan artefak value chain diagram. Melakukan identifikasi terhadap stakeholder yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam pengembangan SPBE yang digambarkan dalam stakeholder map matrix.
3. Selanjutnya pada arsitektur proses bisnis melakukan identifikasi terhadap visi misi, tujuan, sasaran strategis, dan program prioritas pada RPJMD tahun 2018-2023 yang menghasilkan artefak peta proses bisnis level 0 dan 1 serta peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan tingkatan level agar memudahkan dalam penggambaran. Peta proses bisnis level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang merupakan turunan langsung dari visi, misi dan tujuan di dalam dokumen rencana strategis. Peta proses bisnis level 1 merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peta proses bisnis level 0, yang dapat diidentifikasi dari program pembangunan daerah dari tujuan atau sasaran strategis pemerintah. Sedangkan peta lintas fungsi berfungsi untuk menggambarkan rangkaian kerja lintas unit, dapat diidentifikasi dari kegiatan kerja dari masing-masing program pembangunan daerah. Penggambaran proses bisnis ini dimodelkan dengan BPMN (Business Process Modeling Notation). BPMN merupakan standar untuk memodelkan proses bisnis agar informasi dapat dipahami oleh semua pengguna bisnis dengan mudah.

Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu tahap kesimpulan dan saran. Tahap ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesimpulan dari hasil perancangan EA SPBE di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Cirebon dan menghasilkan saran untuk dapat digunakan sebagai perbaikan pada penelitian berikutnya

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Preliminary Phase

*Preliminary phase* merupakan tahap awal dari perancangan EA. Pada fase ini menjelaskan penentuan ruang lingkup dan prinsip-prinsip EA yang digunakan pada Pemda Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perancangan EA SPBE arsitektur domain proses bisnis dari level 0 dan 1 hingga peta lintas fungsi yang menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dan sosial. Prinsip arsitektur domain proses bisnis digunakan sebagai acuan untuk perancangan selanjutnya dilihat pada Tabel II. Principle Catalog.

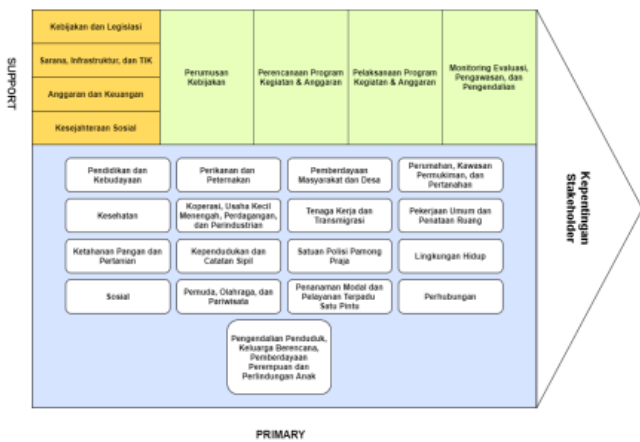
Tabel II  
PRINCIPLE CATALOG

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
1	Primacy of Principles	Prinsip-prinsip manajemen TI dan SPBE akan berlaku untuk seluruh SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Cirebon
2	Information Management is Everybody's Business	Seluruh SKPD berpartisipasi dan selaras dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah dan SPBE
3	Common Use Applications	Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemda lebih disukai daripada pengembangan aplikasi serupa atau duplikasi yang hanya disediakan untuk SKPD tertentu
4	IT Responsibility	Diskominfo bertanggung jawab atas implementasi dan infrastruktur TI yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan layanan pemerintah. Setiap proses manajemen data dan informasi yang dijalankan oleh SKPD di lingkungan
5	Compliance with Law	Pemda Kabupaten Cirebon harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap semua hukum, undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang ada
6	Innovation	Pemda Kabupaten Cirebon dapat melakukan penelitian terstruktur dan mencari cara inovatif menggunakan teknologi untuk mendukung layanan

pemerintah berbasis elektronik.

B. Architecture Vision

Fase architecture vision merupakan fase pertama di dalam siklus TOGAF ADM yang bertujuan untuk mendefinisikan visi misi, aktivitas utama dan pendukung, serta hubungan stakeholder Pemda Kabupaten Cirebon. Artefak keluaran pada fase ini yaitu value chain diagram dan stakeholder map matrix. Pada Gambar 3. Value Chain Diagram mendefinisikan nilai aktivitas utama (primary) terdapat urusan pelayanan pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan aktivitas pendukung (support) merupakan administrasi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi Pemda Kabupaten Cirebon. Stakeholder yang terkait dijelaskan pada Tabel III.



Gambar 3. Value Chain Diagram

Tabel III. Stakeholder Map Matrix

No	Stakeholder	Role	Class
1	Bupati	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE di Pemda Kabupaten Cirebon  Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda	Key Player
2	Sekretariat Daerah	Kabupaten Cirebon serta mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemda lain.	Key Player
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengoordinasikan pengelolaan arsitektur SPBE, mengoordinasikan pembangunan aplikasi	Keep Informed

dan infrastruktur TIK, serta melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemda Kabupaten Cirebon	Keep Informed
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Mengoordinasikan perencanaan SPBE serta mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data	Keep Informed
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda Kabupaten Cirebon	Keep Informed

C. Arsitektur Proses Bisnis

Fase arsitektur proses bisnis merupakan tahapan utama dalam perancangan EA ini. Model perancangan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada amanah Perpres No. 95 tahun 2018 serta Permen PANRB No. 19 tahun 2018. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan. Artefak yang dihasilkan dari tahap ini yaitu peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi dengan contoh penggambaran pada bidang kesehatan dan bidang sosial Pemda Kabupaten Cirebon.

Peta proses bisnis level 0 memuat penggambaran keseluruhan proses untuk mencapai visi misi Pemda Kabupaten Cirebon yang diidentifikasi berdasarkan sasaran strategis di dalam RPJMD tahun 2018-2023. Terdapat 15 proses yang digambarkan dalam peta proses bisnis level 0 dan dinamakan menggunakan kode proses yaitu KabCin (Kabupaten Cirebon). Masing-masing proses tersebut merupakan sasaran dari Pemda Kabupaten Cirebon. Terdapat dua tipe proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang berperan langsung memenuhi kebutuhan pengguna eksternal maupun internal dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintahan dalam pencapaian visi misi. Sedangkan proses pendukung merupakan proses untuk mendukung pengguna internal dalam pengelolaan operasional dan administrasi pemerintahan. Pada Gambar 4. berikut menggambarkan peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Cirebon.

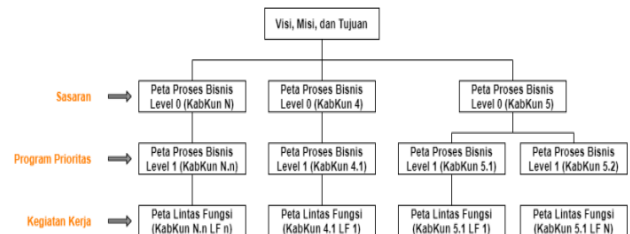
Penjelasan deskripsi masing-masing proses dari peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Cirebon dilihat pada Tabel IV berikut ini.

TABEL IV  
DESKRIPSI PROSES BISNIS LEVEL 0

Kode Proses	Nama Proses	Tipe Proses
KabCir 1	Penyelenggaraan mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	Utama
KabCir 2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, serta kehidupan masyarakat yang agamis berbasis kearifan lokal senidan budaya	Utama
KabCir 3	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Utama
KabCir 4	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Utama
KabCir 5	Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan	Utama
KabCir 6	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Utama
KabCir 7	Peningkatan pengarus utamaan gender	Utama
KabCir 8	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Utama
KabCir 9	Terbangunnya desa unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonom	Utama
KabCir 10	Terwujudnya daya dukung	Utama

	investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat desa	
KabCir 11	Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Utama
KabCir 12	Pengelolaan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Utama
KabCir 13	Tata kelola pemerintahan yang akuntabe	Pendukung
KabCir 14	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	Pendukung
KabCir 15	Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan asli dan keuangan daerah	Pendukung

Peta proses bisnis level 1 merupakan model peta proses bisnis yang digambarkan menggunakan notasi sub-proses BPMN sebagai penggambaran lebih rinci dari masing-masing proses di proses bisnis level 0. Proses bisnis level 1 diidentifikasi berdasarkan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2023 yang terdapat di RPJMD tahun 2018-2023. Hirarki pemetaan proses bisnis dari level 0 ke level 1 dan peta lintas dijelaskan melalui Gambar 5. Hirarki Pemetaan Proses Bisnis berikut



Gambar 5. Hirarki Pemetaan Proses Bisnis

Hirarki pemetaan proses bisnis di atas menjelaskan proses identifikasi dan penurunan proses dari level 0 ke level 1 hingga peta lintas fungsi. Pada Gambar V. hanya menyajikan contoh penggambaran model peta proses bisnis

level 1 hingga lintas fungsi yaitu pada proses KabCir 4 di bidang kesehatan dan KabCir 5 di bidang sosial. Berikut merupakan model peta proses bisnis level 1 KabCin 4 dan peta proses bisnis level 1 KabCir 5

Penjelasan deskripsi masing-masing proses dari peta proses bisnis level 1 KabCir 4 dan KabCir 5 Pemda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel V berikut ini.

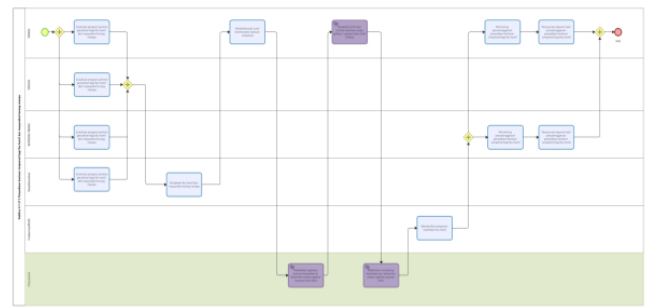
TABEL V  
DESKRIPSI PROSES BISNIS LEVEL 1 KABCIR 4 DAN KABCIR 5

Proses Level 0	
KabCin 4	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
KabCin 5	Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan
Proses Level 1	
KabCin 4.1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
KabCin 5.1	Program perlindungan dan jaminan sosial
KabCin 5.2	Program pemberdayaan sosial

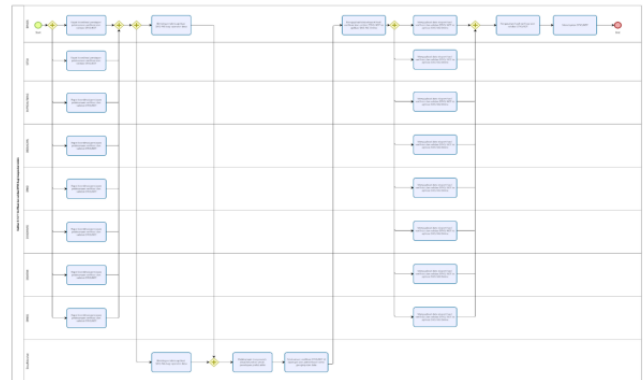
Pada Gambar 6 menunjukkan proses yang lebih detail dari Proses KabCir 4 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat sebuah sub-proses yaitu KabCir 4.1 yang merupakan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada program ini yaitu Dinas Kesehatan.

Pada Gambar 7 menunjukkan proses yang lebih detail dari Proses KabCir 5 Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sub-proses yaitu KabCir 5.1 Program perlindungan dan jaminan sosial dan juga KabCir 5.1 Program pemberdayaan sosial. Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada program ini yaitu Dinas Sosial.

Keluaran selanjutnya yaitu peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja lintas perangkat daerah yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja dari masing-masing proses pada peta proses level 1. Pemetaan lintas fungsi ini diidentifikasi dari kegiatan kerja yang terdapat di dalam program prioritas di peta proses level 1. Penggambaran peta lintas fungsi menggunakan model BPMN. Sesuai dengan turunan peta proses level 1 di atas serta identifikasi program prioritas pembangunan tahun 2021, maka kegiatan yang digambarkan menjadi peta lintas fungsi yaitu peta lintas fungsi dari KabCir 4.1 dan KabCir 5.1.



Gambar 8. Peta Lintas Fungsi KabCir 4.1.LF 2



Gambar 9. Peta Lintas Fungsi KabCir 5.1 LF 1

Penjelasan deskripsi masing-masing kegiatan dari peta lintas fungsi KabCir 4.1 dan KabCir 5.1 Pemda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel VI berikut ini.

TABEL VI  
DESKRIPSI PETA LINTAS FUNGSI KABCIR 4.1 DAN KABCIR 5.1

Proses Level 1	
KabCir 4.1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
KabCir 5.1	Program perlindungan dan jaminan sosial
Lintas Fungsi	
KabCir 4.1 LF 2	Kegiatan penyediaan bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) bagi Ibu hamil dan masyarakat kurang mampu
KabCir 5.1 LF 1	Kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin

Pada Gambar 8 di atas merupakan peta lintas fungsi dari KabCir 4.1 LF 2 yaitu kegiatan penyediaan bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) bagi Ibu hamil dan masyarakat kurang mampu, yang terdapat pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk

upaya memperkecil angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan pada masyarakat kurang mampu. Terdapat aktivitas target sebagai usulan untuk dilakukan standarisasi dan integrasi dengan aplikasi layanan publik dan rumah sakit di Kabupaten Cirebon.

Pada Gambar 9 di atas merupakan peta lintas fungsi KabCir 5.1 LF 1 yaitu kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin, yang terdapat pada program perlindungan dan jaminan sosial. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial Pemda Kabupaten Cirebon.

#### IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan proses penelitian perancangan enterprise architecture sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Cirebon maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil keluaran artefak dari preliminary phase menghasilkan principle katalog yang menjelaskan prinsip-prinsip utama proses bisnis Kabupaten Cirebon dalam pengembangan perancangan EA kedepannya.
2. Pada fase architecture vision menghasilkan value chain diagram yang menjelaskan nilai-nilai utama dan aktivitas dalam mencapai visi misi Pemda Kabupaten Cirebon serta menghasilkan stakeholder map matrix yang menjelaskan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPBE di Pemda Kabupaten Cirebon.
3. Pada fase arsitektur proses bisnis model perancangan dan pemetaan proses bisnis berdasarkan PermenPANRB No. 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Sehingga pada fase ini menghasilkan peta proses bisnis level 0 yang di dalamnya terdiri dari 15 proses (sasaran strategis) bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan proses yang dijalankan untuk mencapai visi misi Kabupaten Cirebon. Pada peta proses bisnis level 1 dan peta lintas fungsi menggunakan contoh penggambaran melalui bidang kesehatan dan bidang sosial, jadi peta proses bisnis level 1 menjelaskan bentuk rinci dari proses utama KabCir 4 bidang kesehatan dan KabCir 5 bidang sosial. Sedangkan pada peta lintas fungsi merupakan kegiatan yang menggambarkan alur kerja dan keterkaitan perangkat daerah dari program di proses bisnis level 1. Seluruh hasil penyusunan peta proses bisnis bertujuan dapat memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi dan layanan SPBE pada Kabupaten Cirebon. Jika Anda

mengalami kesulitan dengan judul pada gambar (sumbu vertikal dan horisontal), Anda dapat memilih untuk menambahkan judul di kotak teks yang terpisah, daripada memasukkan ke dalam grafik. Ini kadangkala membantu agar dapat terbaca dengan jelas.

#### DAFTAR ACUAN

- [1] P. H. Parsaorantua, Y. Pasoreh, and S. A. Rondonuwu, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado)," *Acta Diurna*, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
- [2] M. A. Machmudi, "Peran Teknologi Informasi dalam Usaha Meraih Kesempatan Masa Depan Organisasi," *J. Transform.*, vol. 15, no. 1, pp. 87–95, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/JT/article/view/187>.
- [3] R. H. Pratama, A. Hakim, and M. Shobaruddin, "Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya)," *J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 12, pp. 2128–2132, 2015.
- [4] H. D. Pratiwi, W. H. N. Putra, and A. D. Herlambang, "Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )," vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020
- [5] United Nations, "UN E-Government Knowledgebase," 2020. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>.
- [6] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta, 2018.
- [7] KemenPANRB, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," 2018, doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- [8] KemenPANRB, "Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kuningan," 2019. <https://spbe.go.id/moneval/detail/OTRjMDA4NDVmZWYzNjQxZWZh>.
- [9] D. Y. Handika, R. Mulyana, and N. Ambarsari, "Analisis Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM (Studi Kasus: Disparbud Kabupaten Bandung Barat)," *Syst. Inf. Syst. Informatics J.*, vol. 5, no. 1, pp. 48–54, 2019, doi: 10.29080/systemic.v5i1.634.
- [10] A. H. Fikri, W. Purnomo, and W. H. N. Putra, "Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM pada PT. Hafintech Prima Mandiri," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 7, pp. 2032–2042, 2020.
- [11] E. Nurmiati and S. Abdul Mughni Ashiroto, "Perencanaan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Architecture," *Appl. Inf. Syst. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 59–68, 2020.
- [12] The Open Group, *The TOGAF Standard, Version 9.2*. 2018.
- [13] Object Management Group, *Business Process Model and Notation*, vol. 2.0. 2011.
- [14] A. Rachmanto and M. R. Fachrizal, "Perancangan Enterprise Architecture dengan Framework TOGAF ADM Pada Rumah Sakit Umum di Cimahi," *J. Teknol. dan Inf.*, vol. 8, no. 2, 2018, doi: 10.34010/jati.v8i2.1037.

- [15] W. F. M. Haryono, R. Mulyana, and N. Ambarsari, "Perancangan Information System Architecture Menggunakan Togaf Adm Pada Fungsi Promosi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)," *Fountain Informatics J.*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.21111/fij.v5i1.3312.
- [16] KemenPANRB, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah*. 2018